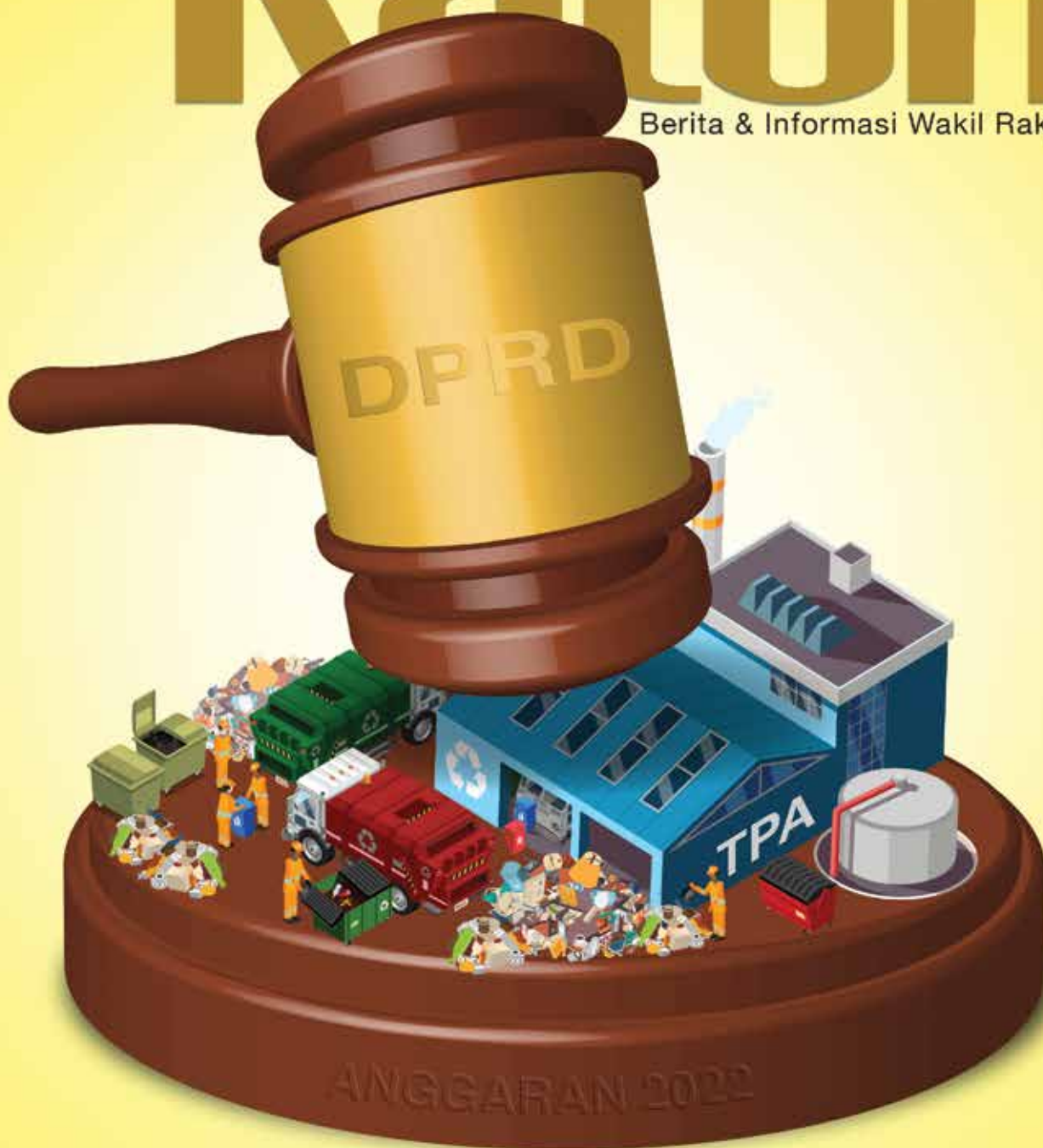




# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



## APBD 2022 Mulai Beberes Sampah



# Ketukan Akhir Tahun



**K**etukan palu paripurna penyesuaian APBD tahun anggaran 2022 menjadi petanda jika tahun 2021 akan segera berakhir. Akhir tahun selalu penting jika digunakan sebagai refleksi. Momentum untuk melihat ke dalam diri sendiri sekaligus berinstrospeksi.

Waktu ujung tahun, juga menjadi kesempatan mencari tahu apa saja tantangan yang kita hadapi dan cara kita untuk bertahan di tahun yang akan datang. Setidaknya agar kita tahu apa yang mesti diupayakan dan lebih terbayang untuk diperjuangkan.

Kita bersyukur mampu melewati tahun 2021 ini dengan baik dengan pelbagai dinamika keadaan yang terjadi.

Tepat edisi Desember ini, majalah Cirebon Katon genap berusia dua tahun setelah berganti dari 'Biwara' menemani para pembaca budiman, mewarnai media informasi yang konsisten menyajikan berita wakil rakyat Kabupaten Cirebon.

Tentu dua tahun, bukanlah

usia yang matang. Masih banyak hal yang harus dibenahi dan dievaluasi. Jika di tahun kedua ini, kita telah menambah rubrik tentang pemerintah desa. Di tahun yang akan datang kita bersiap untuk lebih berinovasi dengan menghadirkan majalah Cirebon Katon dalam bentuk daring yang dapat diakses melalui gawai.

Kami merasa senang, jika selama empat kuartal para pembaca budiman begitu antusias memberi koreksi dan masukan konstruktif. Kami juga sangat berterimakasih kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi menjadi narasumber selama ini.

Kita berharap di akhir tahun ini selain untuk refleksi, juga sebagai jeda penyemangat agar lebih baik lagi. Bertepatan dengan libur Nataru, seluruh jajaran redaksi mengucapkan selamat merayakan natal bagi yang merayakan. Sebagai pamungkas, kami menyajikan informasi terkini alokasi APBD Kabupaten Cirebon untuk tahun 2022. Selamat membaca Cirebon Katon.

#### Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

#### Pengarah :

**Muklisin Nalahudin, SH, MH.**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**Abdul Rohman**  
(Ketua Komisi 1)

**Mad Saleh**  
(Ketua Komisi 2)

**H. Hermanto, SH**  
(Ketua Komisi 3)

**Siska Karina, MH**  
(Ketua Komisi 4)

#### Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

#### Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Susilaningrat**  
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

**Drs. H. Sucipto, MM**  
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

#### Redaktur Pelaksana :

**Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM**  
(Kasubag Humas dan Protokol)

#### Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

#### Penyunting :

**Dra. Puti Amanah Sari**  
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

#### Redaktur :

**Yusuf**

#### Reporter :

**Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah**

#### Fotografer :

**Qushoy**

#### Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

#### Data dan Riset :

**Oman**

#### Distribusi :

**Firman • Misbah**

#### Korespondensi:

**redaksi.cika@gmail.com**

#### Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**  
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon  
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

APBD 2022

Rudiana: Kita Pastikan Pengawasan Ketat Capai Target Program

6 | Ada 8 Program Prioritas di 2022



## 14 | KILAS

Hadiri Sosialisasi Wasbang Kecamatan



## 18 | PUBLIKA

Saran Benahi Sistem Drainase



## 20 | INSPIRASI

Cirebon Kreatif Snack

Nama Baru yang Sukses di Ritel Modern



## 22 | LENSA

Batik Ciwaringin

Tapak Perjuangan dan Kaum Santri



## 24 | PROFIL

Nurholis

2 Tahun Jadi Penerjemah Bahasa Arab

## 28 | DINAMIKA

Monitoring Penyerapan Dana Refocusing

30 | Komisi I Sambangi Kemendagri Adukan Stok Blanko e-KTP

32 | Komisi III Ingin DPUPR Capai Target Pembinaan Jalan

34 | Komisi IV Dorong Inventarisasi Kerusakan Sekolah

## 36 | POTENSI

Bumdes Usaha Sejahtera

Fokus Beras Merah Jadi Produk Unggulan



## 38 | DESA

Jatianom

Prioritas Benahi Jalan dan Bangun Ruko

## APBD 2022

# Rudiana: Kita Pastikan Pengawasan Ketat Capai Target Program

DPRD Kabupaten Cirebon berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap dapat capai target realisasi program, meski nilai APBD 2022 sedikit menyusut.



Saat matahari mulai beranjak naik di atas ubun-ubun, ruangan paripurna sudah ramai dipenuhi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka tengah membahas persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon tahun Anggaran 2022 bersama Bupati Cirebon H Imron.

Rudiana, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang memimpin rapat pun menanyakan persetujuan pengesahan. Seirama. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon menyetujuinya. Tok, bunyi palu menjadi petanda APBD Kabupaten Cirebon tahun 2022 pun disahkan.

Total rancangan APBD tahun 2022 yang disepakati berjumlah Rp 3,4 triliun atau Rp 3.444.444.980.140. Jumlah itu terpaut jauh dari harapan semula yang diperkirakan dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022 senilai Rp 5,1 triliun.

Jika dirinci, nilai APBD 2022 dihasilkan dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk sebesar Rp 710 miliar. Berasal dari pajak daerah Rp 261 miliar, retribusi daerah Rp 17 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan sejumlah Rp 9 miliar.

Sementara pemasukan terbesarnya berasal dari penerimaan dana transfer Pemerintah Pusat atau APBN sebesar Rp 2,64 triliun atau Rp 2.642.773.360.000.

Jika dibandingkan dengan APBD 2021, penerimaan pendapatan dari dana transfer mengalami penurunan yang semula Rp 2,7 triliun atau Rp 2.715.479.462.000.

Begitu pun dengan total Belanja Daerah yang mengalami penyusutan sedikit dari 2021 sebesar 3,47 triliun menjadi Rp 3,43 triliun untuk 2022. Hal itu meliputi Belanja Operasional sebesar Rp 2,50 triliun, Belanja Modal Rp 230 miliar, Belanja Tak Terduga Rp 34 miliar serta Belanja Transfer Rp 665 miliar.

“Anggaran belanja daerah, kita prioritaskan



untuk urusan pemerintahan, program penunjang daerah, pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan kewilayahan serta untuk penanganan pandemi Covid-19," ujar Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tciptaningsih.

Meski begitu, jika dilihat jumlah kebutuhan 2022, terlihat adanya defisit senilai Rp 80 miliar. Namun telah tertutupi oleh penerimaan pembiayaan sisa lebih anggaran (Silpa) tahun 2021 sebesar Rp 91 miliar. Yang berarti Silpa APBD 2022 berakhir nol atau nihil setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 11 miliar.

Selain itu, perbandingan Pen-

dapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2022 pun mengalami penurunan Rp 33,6 miliar atau Rp 33.677.686.240 jika dibanding 2021. Namun ada kenaikan dari sektor PAD yang tahun sebelumnya dipatok Rp 671 miliar naik sedikit menjadi Rp 710 miliar.

Selanjutnya, Belanja Modal yang sebelumnya dipatok Rp 178 miliar, TA 2022 naik dengan selisih Rp 52 miliar. Kemudian Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan yang semula Rp 28 miliar menjadi Rp 34 miliar.

Rudiana mengatakan, jika penurunan APBD 2022 lantaran pandemi Covid-19 masih berlangsung. Sehingga dana trans-

fer yang berasal dari APBN pun mengalami penurunan. Namun ia berharap pemerintah daerah tetap dapat mengoptimalkan anggaran yang ada. Segala bentuk program yang sudah direncanakan harus dilakukan dengan tepat dan terealisasi capaiannya.

"Kegiatan yang dirancang dan anggaran program tiap OPD telah ikut serta merancang bersama. Pada intinya, kami di DPRD menyepakati apa yang menjadi harapan dan upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sambil berjalan kita pastikan pengawasan dan pengawalan bersama dalam pelaksanaannya," kata Rudiana.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan ST menilai, jika pada 2021 pemda belum serius dalam menyelesaikan permasalahan. Misalnya, soal penanganan sampah, banjir dan rekonsiliasi data.

Oleh karena itu, Sofwan berharap pada pelaksanaan program TA 2022 seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terintegrasi satu sama lain, dalam menyelesaikan persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Selain itu, agar program dapat terealisasi secara realistis, kata Sofwan, SKPD diharapkan memperbaiki indikator input, output dan outcam. Ia juga tak lupa mengingatkan agar program kegiatan dapat akuntabel dan memperhatikan undang-undang yang berlaku.

Dalam APBD 2022, Pemkab Cirebon telah menyiapkan 8 isu pembangunan skala prioritas dengan tetap mengacu para perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi.

"Mari kita semua berharap agar pandemi berakhir. Sehingga aktivitas masyarakat dan ekonomi dapat tumbuh lebih baik," tandas Imron. • **Muiz**

# Ada 8 Program Prioritas di 2022

APBD Kabupaten Cirebon tahun 2022 memuat delapan prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai. Apa saja?



**A**PBD Kabupaten Cirebon 2022 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada 18 November 2021 lalu. Meski nominalnya sedikit turun dari APBD 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon telah memprioritaskan 8 program strategis untuk tahun depan.

Bupati Cirebon H Imron mengatakan, APBD 2022 telah sesuai dengan kemampuan daerah sebagaimana alokasi dana transfer dari Kementerian Keuangan. Disamping itu, ia juga menerangkan jika prioritas pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Cirebon.

Lebih lanjut, kedelapan prioritas pembangunan yakni, peningkatan akses kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. Kebijakan turunannya, berkaitan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan sanitasi sekolah, penambahan kegiatan kesetaraan pendidikan paket, pendidikan non formal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Kemudian ada pula penyediaan beasiswa, satgas bebas Drop Out (DO), pengembangan sistem transportasi ke dunia pendidikan serta perbaikan manajemen pendaftaran peserta didik baru (PPDB),” kata Imron,

sebagaimana tercatat pula dalam APBD 2022.

Kedua, program perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dimana, Pemkab Cirebon akan memberikan solusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat tak mampu melalui Kartu PEPEK, peningkatan program Indonesia Sehat serta peningkatan cakupan PBI bagi penduduk miskin untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC).

Ketiga, program penyediaan infrastruktur wilayah. Turunannya, Pemkab Cirebon akan meningkatkan cakupan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan. Ada pula optimalisasi

pengembangan jaringan irigasi, normalisasi sumber air, drainase dan pengembangan embung, pengendalian banjir, optimalisasi kawasan kumuh, pengembangan air limbah dan pengembangan proteksi kebakaran.

Selanjutnya APBD 2022 juga mencatat, program pengembangan ekonomi kerakyatan untuk sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi. Dimana kebijakan prioritasnya akan ada peningkatan daya saing industri, penguatan neraca dagang, pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan pangan, pertanian, peningkatan produksi perikanan serta sektor wisata.

Sementara untuk prioritas kelima yakni, penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. Dinsos Kabupaten Cirebon sebagai *leading sector* berencana memfasilitasi perlindungan sosial dengan kartu PEPEK, pemberdayaan PMKS, perlindungan jaminan sosial untuk korban bencana, lansia, orang terlantar serta peningkatan pelayanan fakir miskin bidang sosial.

Keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian ruang untuk keberlanjutan pembangunan. Dengan turunan program pengelolaan persampahan dari hulu hingga hilir, pengendalian pencemaran lingkungan, ketersediaan ruang terbuka hijau, legalisasi zona Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta kesiapsiagaan mitigasi bencana.

Untuk bidang ketenagakerjaan sebagai solusi tingkat pengangguran terbuka, Pemkab Cirebon juga telah menyiapkan prioritas perluasan kesempatan kerja dan penguatan jiwa kewira-



sahaan pada 2022 nanti. Yakni melalui program pemetaan sinkronisasi kebutuhan tenaga kerja dengan dunia industri maupun potensi lokal ekonomi daerah.

Tak hanya itu, Pemkab juga menyiapkan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya membekali kapasitas calon tenaga kerja, perluasan program pemagangan, jaminan tenaga kerja hingga sinergitas pengawasan ketenagakerjaan.

Prioritas terakhir yakni, pembangunan daerah mengenai reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima. Dimana dari seluruh prioritas, prioritas ini memiliki anggaran terbesar dari lainnya.

Pasalnya, Pemkab berencana

mereformasi pemenuhan sarana perekaman dan cetak administrasi kependudukan dan e-KTP. Lalu, peningkatan sarana layanan bagi kecamatan penerima insentif desa mandiri serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur. Baik pelatihan teknis bagi Bumdes, Desa Mandiri dan pelatihan perencanaan, penganggaran pembangunan untuk aparatur desa.

“Di luar itu, tahun 2022 kami juga tetap berfokus pada 3 hal. Penanganan Covid-19 dan vaksinasi, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi sebagaimana sinkronisasi kebijakan nasional,” tandas Imron saat bertemu Cirebon Katon seusai paripurna. •Suf

# Menilik Inisiasi Penanganan Sampah 2022

Upaya penanganan sampah menjadi salah satu prioritas yang disepakati Pemkab Cirebon pada 2022 nanti. Bagaimana perjalanannya?



**A**PBD Kabupaten Cirebon 2022 memuat delapan isu strategis yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Salah satunya berkaitan penanganan sampah.

Sampah menjadi barang kronis dan pekerjaan rumah bagi Kabupaten Cirebon yang hingga saat ini belum dientaskan. Dari total volume sampah harian yang berjumlah 4 ton, baru sekitar 15 persen sampah yang telah diangkut DLH menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Kepuh.

Padahal sebagaimana tercatat dalam RPJMD Kabupaten Cire-

bon 2019-2024, sampah menjadi ancaman yang harus diselesaikan secepatnya agar tidak berimbas pada dampak lain.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto juga mengatakan hal serupa. Persoalan sampah di Kabupaten Cirebon tergolong darurat. Agenda tersebut, kata Hermanto, masih *urgent* dan menjadi target utama. Ia mengingatkan pemerintah harus lebih optimal agar bisa secepatnya ditangani.

Salah satu kendalanya, kata Hermanto, minimnya armada pengangkut sampah. Sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kabupaten Cirebon, saat ini baru memiliki 40 armada untuk 40 kecamatan.

“Kalau 1 kecamatan 1 armada, kira-kira bisa membersihkan tidak? Karena dari satu kecamatan mencakup 10 sampai 12 desa. Apakah satu truk bisa mengangkut untuk 12 desa? Kita perlu penambahan,” ujarnya.

Perjalanan pengelolaan sampah sebenarnya telah dimulai sejak 2019 saat pengusulan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Dari total 28 raperda inisiatif bupati dan DPRD, terdapat satu raperda yang diusulkan DPRD untuk





Furqon Hendra (Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perencanaan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon)

diubah secepatnya karena dianggap telah usang. Yakni Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

“Raperda pengelolaan sampah Kabupaten Cirebon sebagai bagian keseriusan DPRD untuk menyelesaikan persoalan sampah. Diharapkan, segera dilakukan pembahasan. Serta mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon Muklisin Nalahudin SH MH, Agustus 2021 lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi juga sempat menyatakan akan fokus penyele-

saian sampah dengan memastikan desain kebijakan penganggaran untuk tahun 2022, 2023 dan 2024.

“Kita akan afirmasi penganggaran dan supervisi penuh instansi yang bertanggungjawab agar sampah bisa selesai,” ujar Luthfi.

Hal itu pun terbukti, jika dua skala program prioritas isu besar di tahun 2022 yakni penanganan banjir dan sampah.

“Kita utamakan sampah terlebih dahulu yang akan dientaskan secara bertahap mulai 2022,” ujar Furqon Hendra, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perencanaan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Pasalnya, kata Furqon, sampah sudah menjadi musuh bersama. Gundukan sampah berserakan yang mengganggu hampir dapat ditemui di seluruh desa. Alasannya masih klise. Karena tak tersedianya TPS dan jauhnya TPA. Belum lagi rendahnya kesadaran masyarakat maupun minimnya armada pengangkut yang dimiliki DLH.

Furqon pun mengungkapkan, prioritas penanganan sampah pada 2022 nanti tidak lepas dari peran anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang selalu mengingatkan Pemkab Cirebon tiap rapat paripurna.

“Kalau boleh jujur, Pak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sangat sering nyaring ke Pemda untuk tangani sampah. Tentunya karena berkoordinasi dengan Pak Bupati juga,” ungkapnya.

Perjalanan isu penanganan sampah untuk 2022, menurut Furqon, tak muncul tiba-tiba. Ada tahapan rapat dan pembahasan serta pertemuan bersama DPRD yang telah dilalui sebelum menjadi skala prioritas. Meski dasar acuannya tetap berasal dari RPJMD yang dikaji Bappeda Kabupaten Cirebon.

“Ketika menggodok prioritas 2022, kita kaji hasil masukan DPRD saat mengevaluasi kinerja program Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan memang sampah selalu menjadi hal yang diingatkan DPRD,” kata Furqon.

Selain itu, Furqon juga mengkaji setiap hasil Musrenbang dari tingkat desa hingga kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kemudian hasil tersebut, semua pokok pikiran diurai dan didiskusikan bersama. Munculah penanganan sampah yang naik menjadi skala prioritas.

“Kita kombinasikan pokok-



pokok pikiran dewan, hasil Musrenbang. Lalu siapa saja yang akan ikut andil dalam membantu mendorong penanganan sampah itu. Karena Pemda tidak bisa sendirian, harus bersama-sama membangun,” jelasnya.

Mulanya Pemkab Cirebon sedikit gamang untuk menyelesaikan sampah pada 2022 karena seringkali menemui hambatan. Pada 2019 misalnya, Bupati Cirebon sempat mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendorong pendirian TPA di Pasaleman setelah TPA Ciledug ditutup permanen. Namun hasilnya nihil karena mendapatkan penolakan.

Padahal, kata Furqon, Pemkab telah berupaya menyiapkan *grand design* penanganan sampah. Hanya saja selalu terbentur dengan kondisi di lapangan.

“Kita sebenarnya bingung karena mau memulainya dari

hulu dulu atau hilir dulu. Pun kelalaian kita karena ketidakmampuan dalam mengatasinya. Akhirnya pasrah jika ditolak,” kata Furqon

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bappelitdangda Kabupaten Cirebon Angga Nugraha juga mengakui, jika sampah menjadi isu yang selalu diangkat masyarakat dan DPRD. Meski penyusunannya sempat terhalang memakan waktu lama, anggaran pendirian TPA pada tahun 2022 akhirnya disepakati.

Angga mengungkapkan, semula masyarakat Desa Kubangdeleg juga sempat menolak pembebasan lahan untuk dibuat TPA. Rencana tersebut masih memunculkan pro dan kontra bagi masyarakat setempat. Namun DPRD meyakinkan masyarakat dengan turun dan menyosialisasikannya.

Akhirnya, dari sekian lika-li-

ku perjalanan panjang arah prioritas program penanganan sampah pada 2022 berhasil diketuk. Tak kurang dari Rp 25,5 miliar akan diserap untuk kebutuhan pembangunan TPA Kubangdeleng.

Hermanto pun mengatakan, jika pembangunan TPA Kubangdeleg menjadi kepentingan bersama. Menurutnya penunjukan lokasi pembangunan tidak sekonong-konyong muncul begitu saja. Melainkan berdasarkan hasil kajian. Oleh karena itu dibutuhkan peran seluruh *stakeholder* agar pembangunan TPA berjalan lancar pada 2022 nanti.

“Pemkab Cirebon harus genar sosialisasi. Kampanyekan nilai lebih apabila ada TPA di wilayah tersebut. Antara lain jalan akan bagus, menyerap tenaga kerja dan pengolahan sampahnya melibatkan masyarakat,” pungkas Hermanto. •Lan

# Anggarkan Rp 25 Miliar untuk Bangun TPA Kubangdeleg

Pemkab Cirebon telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 25,5 miliar untuk bangun TPA Kubangdeleg pada 2022. Bagaimana rinciannya?



**K**epala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon Dr Deni Nurcahya ST sempat berjanji jika ia akan memastikan Kabupaten Cirebon bebas sampah pada 2024 mendatang. “Kita bersiap selesaikan persoalan sampah dimulai 2022 hingga 2024 nanti,” ujarnya, September 2021 lalu.

Upaya itu akan diangsur mulai tahun depan. DLH menargetkan pembangunan TPA di Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, pada 2022 mendatang.

Pembangunan TPA Kubangdeleg sendiri, tak lepas dari peran DPRD Kabupaten Cirebon yang terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten

Cirebon untuk serius mengatasi persoalan sampah.

“Kita akan dorong penanganan sampah melalui kebijakan penganggaran mulai 2022, 2023 dan 2024,” ujar Mohamad Luthfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

DPRD pun menyetujui permohonan pemda yang mengajukan dana sebesar Rp 25,5 miliar yang bersumber dari APBD 2022 untuk membangun TPA sampah.

Kepala Bidang Sanitasi dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon Jois Putra menjelaskan, anggaran sebesar Rp 25,5 miliar tersebut dibagi untuk pembangunan kontruksi sebesar Rp 20 miliar dan pengadaan tanah senilai Rp 5,5 miliar.

Namun, Jois belum bisa menjelaskan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan TPA Kubangdeleg lantaran hingga sekarang belum menerima *Detail Engineering Design* (DED) dari DLH.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Cirebon Fitroh juga mengakui belum memberikan DED pembangunan TPA Kubangdeleg ke DPUTR lantaran masih dalam proses pengerjaan. Namun ia menargetkan akan selesai pada Desember 2021.

“Pembangunan TPA Kubangdeleg 2022 nanti, yang terpenting TPA Kubangdeleg bisa secepatnya beroperasi terlebih dahulu. Jadi mungkin belum sampai dipagar,” ungkap Fitroh.



Jois Putra (Kepala Bidang Sanitasi dan Pemukiman Dinas PUTR)



Alasan pembangunan TPA di Kubangdeleg, kata Fitroh, sangat mendesak untuk keperluan pengolahan sampah di wilayah timur. Selain itu, tujuannya agar memudahkan pengangkutan akhir sampah dan mengurangi biaya operasional pengangkutan.

Keberadaan TPA Gunung Santri yang berlokasi di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, menurut Fitroh, sudah tak dapat diandalkan karena daya tampungnya yang sudah *overload*. Apalagi jaraknya jika ditempuh dari wilayah Cirebon timur membutuhkan waktu lama dan biaya operasi yang besar.

"Itu terbukti ketika TPS Ci-

ledug masih beroperasi. Pengangkutan sampah menuju TPA Gunung Santri membutuhkan waktu pengangkutan dan perjalanan hampir 6 jam. Jadi benar-benar memakan waktu lama," ungkap Fitroh.

Oleh karena itu, dengan rencana pendirian TPA di Kubangdeleg, Fitroh meyakini akan menjadi solusi bagi keberadaan sampah yang menumpuk di wilayah timur.

Saat ini pembangunan TPA Kubangdeleg sedang di tahap pengadaan tanah. Dari 12 pemilik lahan seluas 4,9 hektare yang akan dibebaskan, 5 pemilik lahan belum dibebaskan lantaran

terkendala kesepakatan harga.

Meski demikian, Jois menargetkan proses pengadaan lahan akan selesai paling lama pada Maret 2022 mendatang. Jois pun optimistis jika pembangunan TPA Kubangdeleg akan selesai di akhir tahun 2022. Sehingga akan secepatnya beroperasi.

"Diperkirakan pembangunan kontruksi akan dimulai pada Mei dan selesai di September 2022. Sehingga bulan Oktober sudah bisa uji coba beroperasi," jelasnya.

Senada dengan Jois, Fitroh juga meyakini kebutuhan sarana dan prasarana TPA akan terpenuhi seiring pembangunan selesai.

"Pembangunan TPA Kubangdeleg juga tersinkronisasi dengan pemerintah provinsi yang memiliki program pemenuhan TPA regional. Jadi, saya yakin pemprov akan bantu program kita dengan menyediakan sarana dan prasarana," terangnya.

TPA Kubangdeleg rencananya akan dibangun dengan tambahan fasilitas pengolahan dan pemilahan sampah.

"Intinya, pembangunan TPA memiliki efek domino. Mulai penyerapan tenaga kerja sampai ke pemberdayaan masyarakat," katanya.

Sementara untuk armada pengangkut sampah, pemda juga akan berusaha menambah sarana armada pengangkut sampah dengan meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat (PP).

"Diperkirakan tahun 2022 pemkab membutuhkan 80 unit kendaraan. Sedangkan saat ini pemkab baru memiliki 39 unit. Itu sangat minim apalagi sebagian sudah berumur. Kita usahakan bisa gol 80 unit. •Muiz

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

# Hadiri Sosialisasi Wasbang Kecamatan

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menghadiri kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan (Wasbang) dan ketahanan nasional bagi pejabat kecamatan di DPMD Kabupaten Cirebon.



# Ikuti Perayaan HUT PGRI ke 76

Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon menghadiri peringatan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 76 bertempat di Gedung PGRI Sumber.



foto-foto : Quasy/da

# Bahas Antisipasi Lonjakan Pandemi

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon menggelar rapat virtual untuk membahas upaya antisipasi potensi lonjakan pandemi di libur Nataru.





# Terima Studi Banding DPRD Kulon Progo

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kulon Progo, dalam rangka studi banding kebijakan dan penerapan teknologi informasi komunikasi daerah.



foto-foto : Qusy/da

## Saran Benahi Sistem Drainase

*Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Perkenalkan saya Rini (30) dari desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan. Saya ingin menyampaikan keluhan saya mengenai kondisi desa saya yang dari tahun ke tahun menjadi langganan banjir setiap musim penghujan tiba. Saya kira, kami warga desa Panguragan mempunyai masalah drainase yang masih kurang maksimal dalam mencegah bencana banjir. Sehingga penanggulangan masalah banjir masih menjadi PR bersama sampai hari ini.*

*Saya harap Bapak/Ibu anggota dewan dapat memberikan solusi terbaik, atau mengimbau dinas yang berwenang guna menjawab masalah*



*tahunan yang terjadi di daerah kami. Terimakasih*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
(Rini/Wiraswasta/Cirebon)*

## Warga Ingin Mitigasi Konflik Pasca Pilwu



*Assalamualaikum Wr Wb. Kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Saya Rio (26) Warga Kapetakan. Izinkan saya menyampaikan keluhan setiap momen pasca Pemilihan Kuwu (Pilwu) di Kabupaten Cirebon yang*

*kerap berujung sengketa, kerusuhan bahkan adu santet.*

*Masih kita jumpai dalam setiap selesai hajat demokrasi enam tahunan desa, tidak semua masyarakat Cirebon cukup dewasa dalam menyikapi hasil dari proses demokrasi*

*itu. Itu terbukti kemarin pasca pilwu yang muncul konflik horizontal antar masyarakat bahkan hingga kerusuhan.*

*Hal ini tentu sangat tidak baik dan menjadi preseden buruk. Bahkan sebagian kami yang tidak condong kepada calon kuwu manapun juga berdampak. Saya harap, Bapak/Ibu Anggota Dewan perlu mengambil langkah tegas untuk mencegah dan memitigasi ketertiban pasca Pilwu kedepannya.*

*Misalnya dengan memberlakukan aturan pidana jika pendukung salah satu calon melakukan langkah-langkah anarkis yang membahayakan warga sekitar. Saya mengharapkan pesta demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan aman dan kondusif.*

*Wasallamualaikum Wr Wb.  
(Rio/Kapetakan/Cirebon)*

## Mohon Benahi Data Penerima Bansos



(Bansos) di Kabupaten Cirebon carut-marut.

Bahkan tak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi masuk dalam data penerima Bansos.

Timbul pertanyaan di kepala saya, bagaimana mekanisme input data yang dilakukan teman-teman di lingkungan dinas sehingga kriteria penerima bantuan bisa salah dan tidak tepat sasaran. Tentu hal ini akan merugikan warga tak mampu yang seharusnya mendapatkan haknya.

Saya berharap, Bapak/Ibu anggota dewan, dapat mengawasi lebih gesit lagi mengenai data penerima bansos dan mendorong pembenahan sistem input data yang lebih valid. Sehingga dugaan ini tak terulang. Terimakasih Cirebon Katon.

(Ibrahim/Warga/Mundu)

Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Saya Ibrahim

(31) asal Desa Mundu. Izinkan saya menyampaikan laporan dari warga yang sempat mengetahui jika data penerima Bantuan Sosial

## Jalan Prapatan Palimanan Timur Penuh Sampah

Assalamualaikum Wr Wb.  
Perkenalkan saya Rizki (24) warga Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan. Saya ingin melaporkan kondisi Jalan Raden Gilap Blok Prapatan yang saat ini dipenuhi sampah berserakan. Hal ini disebabkan tidak tersedianya fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara.

Sehingga bagi kami warga sekitar, hal ini sangat mengganggu. Seringkali sampah-sampah itu berterbangan akibat tertiuap angin. Begitupun saat kondisi sedang basah, tempat ini menimbulkan polusi bau yang tak sedap.

Mohon kiranya, Bapak/Ibu DPRD Kabupaten Cirebon mendorong penyediaan fasilitas TPS



untuk warga Palimanan Timur khususnya di Blok Prapatan, agar permasalahan sampah di daerah

kami bisa lebih tertangani. Sekian. Wasallamualaikum. Wr Wb.  
(Rizki/Karyawan/Palimanan)

# Cirebon Kreatif Snack

## Nama Baru yang Sukses di Ritel Modern

Sebelumnya, kudapan singkong ini sempat terkena somasi karena memiliki nama yang sama dengan produk lain. Hingga pemiliknya mengubah nama menjadi Cikres dan sukses di pasar ritel modern.



**C**ikres, nama kudapan asli Cirebon ini telah tersedia di berbagai ritel modern. Kudapan singkong goreng ini juga sudah dapat ditemui di toko oleh-oleh khas Cirebon.

Cikres merupakan UMKM lokal, karya dari Reza Rahadian dan Eka Mulyadi. Mereka menciptakan Cikres karena latarbelakang banyaknya kritik dan keluhan dari konsumen terhadap berbagai jenis makanan keripik singkong. Konsumen mengeluhkan kerenyahan, ketebalan, dan rasa keripik yang kurang pas.

Sebelumnya, Eka juga sempat membuat identitas produk keripik gandum ubi ungu meski gagal dan tak bertahan lama.

“Tahun 2016-2017 saya pernah sibuk membuat identitas produk. Saya buat dengan merk Ani Jaya, Bos Eka hingga *Chip Snack*. Tapi sama sekali tidak

ada peningkatan penjualan. Enggak pernah bertahan di pasaran,” ungkap Eka.

Akhirnya pada 2018 silam, ia mulai menyibukkan diri untuk meriset segala produk camilan singkong dan membuat kemasan kudapan singkong yang berbeda dari pasaran dengan nama awal *Chip Snack*. Meskipun Eka mengakui jika ia tak memiliki banyak *skill* dan modal yang cukup. Ia hanya punya tekad keberanian dan pandai belajar dari para pelaku usaha lain yang ia datangi.

Eka memiliki keyakinan jika *Chip Snack* akan diterima di market *leader* yakni ritel modern. Benar saja, saat itu yang pertama kali melirik *Chip Snack* adalah Transmart meski sempat mendapat angin tak segar.

Nama *Chip Snack* ternyata telah dimiliki oleh produk yang lain, akibatnya Eka menerima somasi. Dampaknya pihak Transmart akan memutuskan



kontrak sebelum ada pergantian nama *brand* terlebih dahulu.

“Saya menyadari memang ketika riset dan membuat produk, saya justru mengesampingkan legalitas, seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) *brand*. Padahal itu penting, saya juga baca adendurnya, pinalitinya bisa mencapai Rp 100-500 juta,” kata Eka.

Setelah memutar otak, akhirnya Eka memutuskan mengubah nama *Chip Snack* menjadi Cirebon Kreatif Snack atau disingkat Cikres.

“Nama Cikres dipakai agar kita dapat mewakili kebiasaan kita menulis produk dengan oleh-oleh khas Cirebon. Perubahan

nama ini mendapat angin segar dan diterima pihak Transmart,” ujar Eka

Di awal bulan setelah perubahan nama, Eka langsung memproduksi Cikres sejumlah 8000 pcs. Modalnya tak tanggung-tanggung. Ia begitu yakin, jika konsekuensi menggeluti satu produk bidang industri harus totalitas. Meski harus berkali-lipat menggelontorkan modal.

Untuk mendapatkan singkong, Eka bekerjasama dengan para petani yang memiliki kebun singkong dari Desa Tenjolayar, Kabupaten Majalengka serta Desa Kubang, Kecamatan Talun. Karena struktur di kedua wilayah itu, kata Eka, dianggap baik dan mempengaruhi kualitas singkong. Singkong yang Eka

pilih, setidaknya harus berusia 7 sampai 9 bulan.

“Di awal kita perkuat dulu di modal produksi, pasar juga manajemen. Terus memang saat itu, kita langsung ekspansi ke ritel modern. Kita *mapping* area di wilayah 3 ada berapa *outlet*, saat itu sasarannya baru Indomart dan kita langsung mendata ada sekira 750 *outlet* yang telah kita catat. Kita taruh 10 pcs untuk satu *outlet*,” jelas Eka.

Walhasil, jerih payah Eka membuahkan hasil, saat ini Cikres dapat ditemui di toko oleh-oleh Cirebon. Ada berbagai varian rasa, mulai dari pedas, balado, keju, dan lada hitam. Teksturnya yang renyah dan gurih membuat penikmatnya akan ketagihan.

Kemasannya pun beragam, juga harganya yang tak perlu merogoh kocek besar. Cikres dengan ukuran 100 gram hanya dihargai Rp 15 ribu, sementara untuk ukuran 60 gram dijual Rp 10.500. Dan yang terpenting, produk Cikres ini bisa bertahan selama setahun, karena telah teruji di laboratorium.

Eka terus bertahan menjaga kualitas produknya, meski dihantam pandemi Covid-19 dan sempat mengalami kerugian karena penurunan permintaan. Namun kini usahanya mulai membaik kembali.

Keberhasilan Eka mengenalkan produk Cikres kepada khalayak tak terlepas dari berbagai dinamika perjalanannya meski sempat berganti nama. Hingga saat ini omzet Cikres dalam sebulan bisa mencapai Rp 50 hingga 100 juta.

“Memang saat ini, akibat pandemi kita lagi berhenti dulu nyetok di ritel modern. Kita lagi fokus mengembangkan Cikres di kancah nasional,” pungkas Eka.

• Lan



foto-foto : Qusey/dk

## Batik Ciwaringin Bertahan Gunakan Warna Alami

Kawasan sentra batik Ciwaringin di Desa Ciwaringin, menjadi bukti jika Kabupaten Cirebon kaya akan warisan budaya dan sejarah.

Keberadaan rumah industri batik Ciwaringin hingga saat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan.

Selain memiliki motif tersendiri yang menggambarkan sejarah perjuangan santri, warna batik Ciwaringin tak menggunakan bahan kimia melainkan berasal dari kayu-kayuan dan dedaunan.

“Makanya pembuatannya memerlukan waktu yang lama. Kalau pakai pewarna alam bisa tujuh kali pewarnaan, agar motifnya keluar,” ujar Suja'i, salah satu pengrajin batik Ciwaringin.

Penggunaan pewarna alam dimulai sejak 2009 atas rekomendasi UNESCO untuk menjaga pemanasan global. Para pengrajin batik di Ciwaringin telah mengikuti pelatihan dan pembinaan cara memanfaatkan warna-warna dari tumbuhan yang ramah lingkungan. •Soy





## Nurholis

# Dua Tahun Jadi Penerjemah Bahasa Arab

Di usia remaja, Nurholis mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Semasa mudanya ia sempat bekerja menjadi penerjemah di Arab Saudi untuk para TKI. Bagaimana kisahnya?

Laki-laki itu sempat memiliki cita-cita menjadi petani dan guru ngaji saat kecil. Alasannya sederhana, Nurholis tumbuh di sebuah lingkungan keluarga yang taat agama dan berlatarbelakang pesantren. Terutama kakeknya adalah tokoh agama di Desa Pabelan Kulon, yang saban sore mengajar ngaji anak-anak dan remaja.

“Orangtua dan kakek memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan saya. Makanya waktu kecil dulu saya memiliki cita-cita jadi petani. Kalau pagi di sawah, sorenya ngajar ngaji. Itu sempat muncul,” ucap Nurholis.

Begitu berpengaruhnya keluarga, Nurholis pun sempat menempuh pendidikan di pondok pesantren. Tepatnya di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, meski hanya setengah tahun. Setelah itu, ia pindah di Pondok Pesantren Al Anwar Pesawahan, Kecamatan Susukan Lebak hingga 6 tahun.

Tepatnya tahun 1994, Nurholis lulus dari Pesantren Al Anwar. Ia pun pulang dan mengabdikan kesehariannya dengan mengajar ngaji untuk memanfaatkan ilmunya. Hingga 2 tahun berlalu, Nurholis memiliki keinginan baru di hidupnya. Hasrat memiliki pengalaman lain muncul.

Akhirnya pada tahun 1996, ia pergi ke Jakarta untuk bertemu kawannya yang bekerja di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Pada saat itu, temannya mengenalkan Nurholis dengan salah satu pejabat duta besar Arab Saudi yang memiliki kantor perwakilan di daerah Unaizah Provinsi Qasim. Berbekal pengalamannya di pesantren dengan menguasai bahasa arab, Nurholis begitu akrab saat berbincang.

Siapa sangka, dari obrolan yang berlangsung lama dan hangat, pejabat itu begitu tertarik atas kepewaaian Nurholis dalam pelafalan bahasa arab. Di akhir percaka-





pan, ia menawari Nurholis untuk bekerja di Unaizah sebagai penerjemah bahasa.

“Saya spontan langsung bilang mau ketika ditawari. Dan yang paling diingat saat itu, saya disuruh nulis ulang surat Al Fatihah. Ternyata saya langsung diterima, saat itu juga segala persiapan seperti paspor diurus oleh mereka,” kenangannya menceritakan.

Tak butuh lama, Nurholis benar-benar berangkat di Unaizah dan langsung diberikan tugas sebagai penerjemah di tempat para TKI yang baru datang dari Indonesia. Ia pun dikenalkan dengan majikan para TKI Indonesia yang mayoritas bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) maupun supir.

“Kantor perwakilan di sana, tugasnya menjemput para TKI di bandara untuk dibawa ke kantor. Nah saya yang menjembatani antara majikan dengan para TKI. Contohnya majikan itu butuh peker-

ja seperti apa, terus kita sampaikan kepada calon pekerja,” jelasnya.

Sepanjang bekerja menjadi penerjemah di Arab Saudi, Nurholis mendapat pelajaran jika banyak para pekerja di Indonesia yang tak mahir bahasa arab. Dimana sering terjadi kesalahpahaman antara majikan dengan para pekerja.

“Seringkali para majikan mengeluhkan kalau para pekerja tak mengerti bahasa. Sehingga tidak jarang pula berakibat kesalahan saat diperintah dan memicu kemarahan para majikan,” kata Nurholis.

Namun menjadi penerjemah tak berlangsung lama, setelah 2 tahun menekuni pekerjaannya di Arab Saudi. Seusai kontraknya habis ia tak mengambilnya kembali meski dari kantor berharap Nurholis tetap bertahan di Unaizah. Tahun 1998 ia memutuskan pulang ke Indonesia.

Sekembalinya di Indonesia, rupanya membuat Nurholis sedikit kaget dengan kondisi Jakarta yang tenang setelah seminggu sebelumnya reformasi dikumandangkan.

Nurholis pun mulai bergabung di organisasi sosial kemasyarakatan, dari menjadi Koordinator Taruna Siaga Bencana, Koordinator Pendamping PKH, menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga menjadi relawan Rumah Zakat selama 4 tahun.

Tak hanya itu, Nurholis juga bergabung dan resmi menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai tahun 2000. Ia telah mengagumi PKS sejak dirinya tinggal di Arab Saudi. Bagi Nurholis, visi PKS begitu pas. Didominasi anak muda dan tak ada penokohan dalam menentukan kebijakan melainkan asas musyawarah, membuat Nurholis begitu takjub. Hal itu yang membuat Nurholis begitu tertarik.

Meski sebenarnya, ia berbeda pandangan politik dengan ayahnya yang justru dahulu merupakan aktivis Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun tak menjadi persoalan, kedua orangtuanya menghargai pilihan Nurholis. Bahkan sebagian keluarganya pun telah lebih dahulu bergabung menjadi kader PKS.

“Tapi saya sampaikan, orangtua saya cuma pengurus partai belum pernah menjadi anggota dewan. Jadi meski kita berbeda tetapi kita tetap saling mendukung satu sama lain,” terang Nurholis.

Pada akhirnya, tepat 2019 lalu, Nurholis maju dalam perhelatan pemilihan legislatif (Pileg). Ia pun terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024. Para masyarakat di wilayahnya mempercayakan Nurholis menjadi wakil rakyat.

• Lan

# Tati Suhaeti

## Belajar Kepemimpinan dari Baris-berbaris

Di usia remaja, Tati seringkali didapuk memimpin regu baris-berbaris. Ia juga terpilih memimpin desa hingga 10 tahun lamanya. Bagaimana perjalanan perempuan satu ini?

**M**enjadi pemimpin regu barisan bagi teman-teman sebayanya masa sekolah dulu sudah kebiasaan bagi Tati. Di usia remaja kala itu, Tati memang dikenal perempuan yang berani dan berprestasi di bidang keterampilan baris-berbaris. Terbukti, berbagai ajang perlombaan berbaris ia ikuti sejak masih duduk di sekolah dasar.

“Dulu waktu masih seusia SD saya selalu menjadi ketua regu pasukan gerak jalan. Mewakili sekolah sampai pernah menjuarai peringkat satu tingkat Kecamatan Beber,” kenang perempuan pemilik nama lengkap Tati Suhaeti.

Potret masa kecilnya yang sering didapuk menjadi pemimpin pasukan, begitu mengakar di ingatan Tati. Cerita-cerita itu membentuk dirinya menja-

di sosok perempuan tangguh dan dipercaya orang lain. Dan barangkali, itulah yang mengantarkannya mengemban amanah lebih besar saat ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Nasdem.

Karirnya dimulai sejak ia lulus SMA, Tati terlebih dahulu mengenyam pendidikan di Universitas Pasundan (Unpas) Bandung dengan mengambil jurusan administrasi negara. Namun, Tati tak menyangka jika ia tak akan menyelesaikannya setelah mendapat kabar jika kedua orang tuanya wafat. Tati pun kembali ke tanah kelahiran dan memilih melanjutkan kuliah di Cirebon.

“Waktu itu tahun 1991 dapat kabar ayah meninggal, sempat pulang lalu kembali ke Bandung. Tapi tahun 1994 ibu saya menyusul ayah, akhirnya saya

pulang dan memilih pindah kuliah ke Unswagati Cirebon,” katanya.

Sementara perjalanan di dunia pemerintahan, dimulai sejak tahun 2002. Tati menjadi kuwu Desa Beber setelah dipilih karena kebiasaannya yang dekat dengan siapapun.

Bahkan, karakter Tati yang mudah bergaul membuat warga Desa Beber memilihnya memimpin desa kembali pada pemilihan selanjutnya.

“Saya sudah sangat dekat dengan masyarakat desa sebelum menjadi kuwu. Karena sebelumnya tergabung di organisasi pemuda pancasila. Setiap hari bertemu dan mengobrol banyak dengan banyak orang jadi,” ujarnya.

Selama menjadi kuwu, Tati begitu mengencangkan pembangunan infrastruktur desa. Saat itu kondisi infrastruktur di Desa Beber terbilang masih tertinggal dan belum merata. Sehingga, Tati pun bertekad keras memaksimalkan pembangunan agar Desa Beber bisa lebih maju.

“Persoalan infrastruktur jalan atau jembatan rusak, penerangan jalan sampai air bersih di desa alhamdulillah bisa ditangani dengan baik dan membuat perubahan. Itu menjadi capaian saya waktu masih jadi kuwu,” jelas Tati.

Semasa akhir jabatannya menjadi kuwu, Tati tergugah melanjutkan estafet karir politiknya untuk menjadi anggota dewan. Pada tahun 2011, ia pun mulai bergabung dengan Partai Nasdem setelah mendapat dorongan dari masyarakat dan kawan-kawan sejawatnya. Saat itu, Partai Nasdem merupakan partai yang masih baru.

Tati pun berkomitmen untuk selalu dekat serta menampung



aspirasi masyarakat. Baginya, membantu dan mengayomi masyarakat adalah kewajiban yang harus ia laksanakan. Wujud komitmennya ia buktikan dengan maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Walhasil, Tati terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon pada periode 2014-2019.

“Alhamdulillah dari Partai Nasdem saya terpilih, itu semua berkat doa dan dukungan masyarakat tentunya,” ucap Tati.

Lagi-lagi karena *track record*-nya, Tati terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten pada Pileg 2019.

Bagi Tati, menjadi anggota dewan adalah sebuah kesempatan luar biasa untuk belajar dan menambah ilmu wawasan. Jika di bangku sekolah ia hanya mendapat teori, maka turun langsung di lingkungan masyarakat ia diuji menerapkan teori tersebut dengan baik dan ber-

sesungguh-sungguh. Tak lain tujuannya untuk menebar manfaat bagi orang-orang sebagaimana cita-citanya.

“Saya itu bercita-cita pengen jadi orang yang suka menandatangani. Maksudnya menandatangani hal yang mengandung nilai manfaat maka saya lakukan. Menjadi pemimpin yang memberi banyak manfaat untuk orang-orang,” jelas Tati.

Di kesibukannya mengemban tugas wakil rakyat, Tati tak sedikitpun lupa akan jati dirinya sebagai ibu rumah tangga. Ia tak pernah melewatkan momen untuk mengurus dan merawat keluarganya di rumah setelah kewajibannya di kantor selesai.

“Saya fokus menjadi dewan sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Terkadang saya juga suka melakukan hobi saya jogging untuk merefleksikan diri sambil memandang alam di sekitar rumah,” kata Tati, tersenyum kecil. •Sar

# Monitoring Penyerapan Dana Refocusing

DPKPP dikabarkan menerima dana *refocusing* Rp 13,6 miliar untuk penanganan pandemi. Namun DPKPP mengaku tak menerima anggaran tambahan selain dari APBD 2021.



**P**anitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat evaluasi penyerapan anggaran penanganan pandemi Covid-19 bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan (DPKPP) Kabupaten Cirebon.

Seperti diketahui, sejak pandemi Covid-19 dianggap sebagai wabah dunia, kebijakan peralihan anggaran dilakukan sebagai upaya penanganan.

Tak kurang 20 persen atau berjumlah Rp 192 miliar APBD 2021 Kabupaten Cirebon pun telah direlokasi guna penanggulangan pagebluk. Jumlah tersebut

telah dibagi rata untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang menjalankan program penanganan Covid-19. Salah satunya DPKPP.

“Rapat kali ini, kita ingin tahu laporan penyerapan anggaran penanganan pandemi oleh DP-KPP,” ujar Mahmudi Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon.

Pasalnya, kata Mahmudi, berdasarkan laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat rapat bersama Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, DPKPP Kabupaten Cirebon dikabarkan telah menerima dana sejumlah Rp 13,6 miliar dari *refocusing*.

“Sehingga kami perlu tanyakan bagaimana penggunaan anggaran *refocusing* itu?” tanya Mahmudi kembali.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon Ery Ahmad Husaery yang hadir saat rapat tak banyak menjawab penggunaan dana *refocusing*. Ia hanya melaporkan penggunaan anggaran dari APBD 2021 sejumlah Rp76,4 miliar yang dialokasikan untuk 10 sub kegiatan.

“Kalau yang 10 sub, programnya sedang berjalan. Meskipun persentase penyerapannya masih kecil. Terutama di sub kegiatan keagamaan yang saat ini



belum terealisasi,” jelas Ery.

Meski demikian, Ery optimis dari sisa bulan 2021, seluruh program DPKPP Kabupaten Cirebon akan dapat terealisasi semua sehingga penyerapan anggaran bisa optimal.

Sejauh ini, kata Ery, program yang dijalankan DPKPP telah berdampak positif untuk kemaslahatan masyarakat. Terutama program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk 700 unit rumah.

“Untuk satu unit rumah Rutilahu dianggarkan Rp 12 juta yang diajukan melalui kelompok di desa,” ujarnya.

Sementara mengenai angga-

ran *refocusing* yang dikatakan Tim Anggaran, Ery mengatakan ia tak mengetahui.

“Setahu saya anggaran Rp 13,6 miliar itu memang anggaran rutilahu tetapi dari APBD 2021. Bukan tambahan dana *refocusing*,” kata Ery.

Namun Mahmudi tak merasa puas, ia pun meminta kejelasan kelayakan dari status 700 unit rumah yang masuk dalam program Rutilahu.

Ery menjelaskan, jika dari seluruh 700 unit rumah yang terdata, hanya 674 yang layak mendapat program Rutilahu, sementara sisanya tak masuk kategori kembali.

“Sebab 26 unit rumah lainnya

sudah diperbaiki dan sebagian penerima program meninggal dunia. Dan kalau mau diganti atau pindah tangan ke penerima yang lain enggak mudah karena harus melalui proses surat keputusan terlebih dahulu,” jelas Ery.

Meski begitu, Wakil Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setyawan kembali menanyakan kejelasan penggunaan dana *refocusing* penanganan Covid-19 yang dianggapnya belum terjawab tegas.

Padahal sebagian OPD lain telah melaporkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon misalnya, yang menerima dana *refocusing* guna penambahan dan pengadaan oksigen.

“Nah, kalau DPKPP Kabupaten Cirebon menerima dana *refocusing* Rp 13,6 miliar itu dipe-runtukkan untuk apa? Kalau pun programnya sama, yakni rutilahu berapa yang dipakai. Laporan penggunaan itu penting sebagai transparansi anggaran. Jangan sampai justru temuan adanya penyimpangan anggaran,” tegas Aan.

Aan mengingatkan jika penggunaan anggaran pandemi ini tak kunjung dilaporkan akan berpotensi munculnya *double* anggaran saat pembuatan laporan pertanggung jawaban. Karena itu, jika demikian DPKPP benar-benar tak menerima anggaran *refocusing* sebagaimana laporan dari TAPD, maka secepatnya agar DPKPP Kabupaten Cirebon tetap membuat laporan.

“Kalau benar tak menerima hasil dana itu, buat laporan ke TAPD yang berisi pengakuan tak menerima hasil dana *refocusing*. Selanjutnya lakukan konfrontasi dengan TAPD. Kita harus duduk bersama dengan TAPD soal kebenaran alokasi anggaran tersebut,” pungkas Aan. •**Muiz**

# Komisi I Sambangi Kemendagri Adukan Stok Blanko e-KTP

Setelah mendapat laporan pelayanan e-KTP Disdukcapil terhambat karena stok persediaan blanko yang kian menipis. Komisi I kunjungi Kemendagri. Bagaimana jawabannya?



Sudah beberapa bulan pelayanan cetak fisik e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Cirebon tengah mengalami keterlambatan karena stok blanko yang kian menipis. Kendala tersebut disampaikan Disdukcapil saat menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwany Indriyati pun mengkhawatirkan jika stoknya tak akan mencukupi untuk pembuatan e-KTP hingga akhir 2021. Terlebih diketahui pula jika tinta *ribbon* tengah sulit didapatkan yang berimbas pelayanan e-KTP terpaksa harus tertunda.

Hal tersebut membuat tak sedikit warga mengeluh karena harus menunggu lama e-KTP dapat dicetak. Meski saat ini jumlah tinta *ribbon* dirasa cukup untuk persediaan hingga akhir Desember.

“Memang bersyukurnya ketersediaan tinta *ribbon* dirasa aman sampai akhir tahun, namun kendala lain justru blanko e-KTP yang benar-benar tak cukup,” ujar Diah.

Oleh karena itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon Ade Setiadi telah mengirimkan surat ke seluruh kantor kecamatan untuk menunda pelayanan perekaman e-KTP ter-

lebih dahulu.

“Kita khawatir kalau masih dibuka pelayanan, nanti akan menumpuk ketika sudah normal kembali,” kata Ade.

Sejauh ini, Ade melaporkan jika jumlah orang wajib KTP di Kabupaten Cirebon sebanyak 1.685.216 jiwa. Sementara yang telah melakukan perekaman 1.765.213 dan total yang telah memiliki e-KTP sebanyak 1.763.249 jiwa.

“Yang perekaman saja sudah mengantre banyak. Kalau kita maksi buka pelayanan sementara percetakan macet akan antre panjang juga nantinya,” tambahnya.

Selain mengirim surat penun-



daan, Ade mengaku telah mengurangi jumlah penyaluran di setiap kecamatan. Dan untuk mengantisipasi ketersediaan blangko e-KTP yang semakin menipis, Disdukcapil mengambil langkah solusi dengan meminjam terlebih dahulu ke Disdukcapil Kabupaten Indramayu sejumlah 500 keping.

Ade pun meminta masyarakat untuk tetap bersabar menunggu pelayanan e-KTP berjalan karena kendala *ribbon*. Mengingat hal itu sudah terbiasa dan sering berulang.

“Tapi biasanya memang enggak lama. Hanya beberapa ming-

gu kemungkinan akan lancar kembali,” ungkap Ade.

Ade menyebutkan, jika saat ini blangkon yang tersisa hanya 780 keping balik melonjaknya pendaftar e-KTP.

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon bersama Disdukcapil Kabupaten Cirebon pun mengunjungi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta jawabannya pada Oktober 2021 lalu.

Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Antar Negara Kemendagri Suwandi serta

Kepala Seksi Kartu Tanda Penduduk Kemendagri Yuning Sri Harjanti.

Yuning pun langsung menyadari maksud kunjungan Komisi I dan Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Menurutnya, kekosongan blangko e-KTP memang tengah terjadi di banyak daerah sejak tiga bulan terakhir. Penyebabnya karena kebutuhan e-KTP begitu melonjak dari kuota blangko yang disediakan untuk tahun 2021.

Meski begitu, kata Yuning, persediaan blangko untuk memenuhi hingga Desember 2021 dirasa akan cukup. Bahkan menurutnya, beberapa hari lalu sebagian blangko e-KTP telah mulai didistribusikan ke beberapa kota dan kabupaten.

“Sudah ada realisasi dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) sebanyak 5.397.000 keping yang akan didistribusikan ke 514 kota atau kabupaten untuk persediaan hingga Desember,” ujar Yuning.

Untuk itu, ia mempersilahkan Disdukcapil Kabupaten Cirebon agar segera berkoordinasi langsung dengan bagian pendistribusian blangko e-KTP yang ada di Ditjen Dukcapil untuk mengambil blangko yang sudah tersedia. Namun, dengan catatan telah mengirimkan surat pengajuan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Antar Negara Kemendagri Suwandi mengatakan, jika stok blangko untuk tahun 2022 mendatang akan lebih banyak.

“Mohon doa restu agar lelang pengadaan blangko e-KTP tahun 2022 bisa berjalan lancar. Ada sebanyak 10.400.000 keping blangko yang sudah disiapkan,” pungkasnya. • **Muiz**

# Komisi III Ingin DPUPR Capai Target Pembenahan Jalan

Komisi III evaluasi DPUPR Kabupaten Cirebon dalam pembenahan jalan dan jembatan. Mereka meminta DPUPR maksimalkan pengawasan agar dapat capai target.



Memasuki triwulan IV, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon mengenai laporan peningkatan, pemeliharaan jalan hingga jembatan selama tahun 2021.

“Rapat ini dilakukan guna meninjau progres kerja dari kedua bidang utama DPUPR terutama sejauh mana capaiannya hingga bulan ini,” kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hanifah.

Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon dianggap belum

menyeluruh, kondisinya masih jauh dari harapan. Alasannya karena terbentur dengan anggaran. Tahun ini, hanya anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terlaksana oleh DPUPR Kabupaten Cirebon. Anggaran yang sudah siap untuk perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan sebanyak Rp 205 miliar.

“Jumlah anggaran tersebut bukan cuma untuk perbaikan tapi untuk keseluruhan,” kata Ir Iwan Rizki, Kepala DPUPR Kabupaten Cirebon, seperti dikutip radarcirebon pada Juni lalu.

Sementara Kepala Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan DPUPR Kabu-

paten Cirebon Tomy Hendrawan menerangkan, realisasi anggaran bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan hingga September 2021 baru 29,2% dari anggaran yang dia kelola.

Anggaran tersebut disalurkan setidaknya untuk 4 kegiatan yang sedang dikerjakan oleh bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan sebesar Rp 106 miliar. Yaitu rekonstruksi jalan, penggantian jembatan, pembangunan jembatan, dan pembangunan saluran drainase perkantoran.

Tomy pun mengaku, jika dia selalu memantau progres keempat sub kegiatan tersebut, dan





sejauh ini penyerapan anggaran cukup baik. Dari keempat sub kegiatan tersebut sudah mulai terealisasi meski persentasenya belum 100 persen.

“Saya selalu memantau capaian dari 4 kegiatan tersebut, sejauh ini pengerjaan rekonstruksi jalan sudah menyerap anggaran (30,45%), penggantian jembatan (3,24%), pembangunan jembatan (0,36%), dan pembangunan saluran drainase perkantoran (42,70%),” ungkap Tomy.

Selain anggaran, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon juga menyoroti progres fisik dari keempat kegiatan yang sedang dikerjakan Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan. Tomy menjabarkan jika

hingga akhir September 2021 semuanya mengalami capaian yang normal.

“Untuk progres fisik rekonstruksi jalan sudah 51,14%, penggantian jembatan 42,52%, pembangunan jembatan 20,45% dan pembangunan saluran drainase perkotaan sudah 71,19%,” paparnya.

Sementara Bidang Pemeliharaan Jalan juga tak luput dari sorotan Komisi III. Tomi pun melaporkan jika secara fisik capaian sudah 100 % ruas jalan yang telah dilakukan pemeliharaan. Namun, lanjut Tomy, baru diberikan untuk ruas jalan kondisi normal.

Hal itu juga dibenarkan Jois Putra, Kepala Bidang Pemeli-

haraan Jalan DPUPR Kabupaten Cirebon. Dari anggaran yang dikelolanya, setidaknya ada jalan sepanjang 286,24 km yang sudah tertangani atau 132 ruas jalan.

“Bidang kami mengelola anggaran sebesar Rp 12 miliar. Ruas jalan yang dilakukan pemeliharaan adalah ruas jalan yang dalam kondisi baik dan sedang, Idealnya, ada 1300 km panjang jalan yang harus dilakukan pemeliharaan. Secara fisik, capaian dalam bidang kami sudah 100% ruas jalan yang sudah pemeliharaan,” ungkap Jois.

Menanggapi laporan capaian DPUPR, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengingatkan agar DPUPR harus melakukan perhatian yang lebih pada pelaksanaan progres pekerjaan pembangunan. Hal ini bertujuan agar segala capaian kegiatan bisa terealisasi sesuai target yang ditentukan.

“DPUPR harus bisa melakukan seleksi ketat terhadap pelaksana kegiatan pekerjaan. Pertimbangkan juga *track record* pelaksana program walaupun dengan nama perusahaan yang lain atau baru,” tegas Hanifah.

Mesi begitu, Hanifah mengapresiasi atas capaian dari kedua bidang DPUPR tersebut. Namun sekali lagi, Hanifah meminta DPUPR untuk memperhatikan beberapa hal agar capaian target pembenahan infrastruktur jalan, jembatan dan lain sebagainya bisa lebih optimal.

“Kami mengapresiasi atas capaian kedua bidang tersebut, namun yang harus menjadi perhatian dari DPUPR terus memaksimalkan pengawasan kepada pelaksana pekerjaan. Sehingga diharapkan mendapat hasil dan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi sebagaimana ketentuan,” tandas Hanifah. •Par

# Komisi IV Dorong Inventarisasi Kerusakan Sekolah

Selama 2021 banyak kerusakan ruang kelas sekolah dan kekosongan jabatan kepala sekolah di tingkat SD hingga SMP. Komisi IV minta Disdik catat skala prioritas.



**K**epala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon Deni Supdiana mengatakan jika kondisi sekolah di Kabupaten Cirebon banyak yang mengalami kerusakan selama 2021. Sebagaimana tercatat dari total 3.228 ruang kelas, tak sedikit yang mengalami kerusakan. Baik rusak ringan maupun kategori berat.

“Rinciannya ada sebanyak 1.604 kelas rusak ringan, 831 rusak sedang dan 9 ruang kelas yang benar-benar rusak berat,” paparnya.

Meski begitu, Deni mengaku, Disdik telah berupaya memperbaiki sarana prasarana sekolah

untuk menunjang kenyamanan serta keamanan kegiatan belajar mengajar (KBM). Namun, lanjut Deni, Disdik hanya mampu merehabilitasi enam unit ruang kelas yang rusak.

“Dari banyaknya ruang kelas yang mengalami kerusakan itu, baru segitu yang bisa diakomodir kita dari anggaran 2021,” ungkapnya.

Meski pada anggaran perubahan APBD 2021 Disdik mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar namun belum bisa merehabilitasi seluruh ruang kelas rusak yang tercatat. Pasalnya, jumlahnya terlalu banyak.

“Misalnya untuk SDN Cangoak Dukupuntang saja tiga ruang kelas yang atapnya roboh, satu ruang kelas lainnya ambruk. Untuk yang atapnya roboh kami sudah siapkan anggaran sebesar Rp 200 juta, sementara yang ambruk itu akan diajukan pada perubahan APBD 2022 untuk rehab ruang kelas baru,” jelasnya.

Senada itu, Kepala Bidang SMP Disdik Kabupaten Cirebon Amin menyampaikan jika tahun ini ada 300 ruang kelas SMP yang juga mengalami rusak berat. Namun, dalam setiap tahun, program rehabilitasi hanya mampu menangani perbaikan untuk 100 ruang kelas saja.



“Kami di bidang SMP memiliki program penuntasan rasio wc dan penuntasan rehab ruang kelas dari rusak ringan sampai rusak berat. Setiap tahun hanya 100 ruang kelas yang diakomodir,” kata Amin.

Sementara pada 2022 nanti, lanjut Amin, hanya 3 sekolah yang akan mendapatkan rehab menyeluruh, yakni SMPN 2 Plered, SMPN 2 Gunungjati serta SMPN 1 Gegecik.

“Itu semua berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 nanti,” tuturnya.

Mendengar itu, Wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon

ingin menginventarisasi jumlah sarana prasarana sekolah yang rusak terlebih dahulu.

“Mohon Kadisdik secepatnya mendata jumlah sekolah yang benar-benar telah rusak dan layak untuk secepatnya diperbaiki,” ujar Rudiana, saat rapat kerja bersama Disdik dan Sekda, Oktober 2021 lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina pun sepakat agar Disdik dapat membuat daftar ruang sekolah berdasarkan skala prioritas sekolah tingkat kerusakan.

“Supaya mana yang layak direhab terlebih dulu,” jelas Siska.

Di samping persoalan kerusakan sarana prasarana sekolah,

Deni juga menyampaikan jika banyak sekolah yang kekosongan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Cirebon sejak awal 2021. Dimana kekosongan terbanyak terjadi di tingkat SD berjumlah 112 sekolah. Sementara di tingkat SMP mulanya hanya 10 sekolah yang tak memiliki sekolah, namun seiring waktu terus bertambah.

“Dari hanya 10 kosong kepala sekolah hingga sekarang terus bertambah menjadi 15. Hal tersebut lantaran ada beberapa kepala sekolah yang pensiun dan meninggal,” kata Deni.

Meski begitu, sebenarnya untuk pengisi jabatan kepala sekolah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon telah menyediakan 23 calon kepala SMP dan 72 calon kepala SD yang telah mengikuti diklat. Namun Disdik belum mengambil keputusan.

“Pasalnya kita mendahulukan calon kepala sekolah yang lebih senior untuk bisa menduduki jabatan meskipun tetap kita perhitungkan terkait prestasi, dedikasi dan domisilinya,” jelas Deni.

Dasar itu berkaitan dengan masa tugas tiga periode seorang kepala sekolah. Dimana satu periode adalah empat tahun ajaran. Sehingga, seorang kepala sekolah bisa melanjutkan periode keempatnya setelah lulus uji kompetensi.

“Dikhawatirkan bila guru yang masih muda, minim dedikasi dan prestasi diangkat menjadi kepala sekolah dan habis masa jabatannya karena tidak lulus tes kompetensi. Maka dia akan kembali menjadi guru biasa, ditakutkan akan menjadi malas mengajar seperti banyak kejadian kemarin,” tambah Amin. •Sar

## Bumdes Usaha Sejahtera Fokus Beras Merah Jadi Produk Unggulan

Bumdes Usaha Sejahtera saat ini tengah fokus mengembangkan produk unggulan berupa beras merah yang diakui lebih sehat. Bagaimana kisahnya?



Dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, menciptakan produk andalan berupa beras merah. Bermula dari harapan para kelompok tani Desa Pesanggrahan yang ingin memiliki makanan sehat. Pemerintah Desa Pesanggrahan melalui Bumdes bernama “Usaha Sejahtera” pun memfasilitasinya.

Langkahnya, Bumdes mulai memanfaatkan lahan seluas 2 hektare milik sebagian warga dan aset desa untuk ditanam padi merah sejak 2015 silam. Setiap kali panen, mereka pun mampu menghasilkan beras merah hingga 5 ton.

“Memang saat ini beras merah sudah menjadi produk kebanggaan desa. Bumdes Usaha Sejahtera setidaknya sudah pernah menanam 4 jenis beras

merah yang penuh dengan khasiat untuk kesehatan tubuh,” jelas Ketua Bumdes Usaha Sejahtera Suanda.

Suanda menerangkan, jika beras merah yang dikelola Bumdes bersama kelompok tani merupakan beras merah yang sehat. Terbukti meski belum semuanya organik, perawatannya tak memakai obat pestisida melainkan jenis nabati. Selain itu, harganya pun lebih terjangkau dari beras merah lainnya.

“Untuk harga beras merah kami hanya Rp 15 ribu per kilonya, lebih terjangkau dibandingkan harga di supermarket yang mencapai Rp 20 ribu lebih,” terangnya.

Beras merah karya Bumdes Usaha Sejahtera ini, juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Diantaranya, karbohidrat yang kompleks dan kaya nutrisi, *glycemic index* yang rendah berguna untuk pengaturan kadar gula darah, cepat mengenyangkan, zat besi



yang lebih banyak, kaya akan Zinc untuk imun, mengandung vitamin B-6 serta mampu menurunkan kadar kolestrol.

“Sebenarnya saya sudah mencoba semua jenis beras merah, yang lebih lama itu jenis Inpari 24, lalu sejak tahun 2018 mulai muncul beras merah jenis Pamerah, Pamelen, dan Arumba, saya juga mencoba jenis-jenis tersebut,” jelas Suanda.

Setiap usaha tentu tak ujug-ujug berbuah manis. Begitu pun bagi Suanda dan kelompok tani Desa Pesanggrahan. Pasalnya, hingga sampai saat ini mereka belum memiliki pasar yang luas, meski sebenarnya Bumdes telah membuat *website* untuk diakses melalui daring, namun belum

berdampak pada omzet penjualan. Alhasil pemasaran beras merah hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut.

Suanda pun, sempat bekerjasama dengan beberapa komunitas tani hingga meminta bantuan Dinas Pertanian (Dispartan) Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan pemasaran produknya. Namun sampai sekarang belum menemukan titik kelanjutan.

“Pada 2019 lalu, saya mencoba kerjasama dengan komunitas organik di Kota Tasik untuk membantu memasarkan produk kami, namun batal karena ada hal lain. Saya juga sudah minta bantuan Dispartan tapi belum ada respon sampai sekarang,”

jelas Suanda.

Meski belum memiliki pasar yang besar, kata Suanda, sebenarnya beras merah Bumdes Pesanggrahan telah cukup familier di beberapa instansi Kabupaten Cirebon. Bahkan dikenal dan diapresiasi baik oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa (Kemendes) saat mereka berkunjung.

“Kita belum punya pasar besar, tapi untuk tingkat DPMD dan Dispartan sudah tahu kalau di desa kami ada produk beras merah. Kementan Dan Kemendes juga mengakui kalau beras merah kami jauh lebih enak dan berbeda dengan yang lain,” ujar Suanda.

Selain beras merah, Bumdes Usaha Sejahtera tengah mengembangkan jenis beras hitam. Tak kurang 2 tahun ini, Suanda dan timnya terus berinovasi merambah berbagai jenis beras.

“Beras hitam kami juga punya, yang juga memiliki kelebihan tidak kalah unggul dari beras merah. Kita hanya berharap ini menjadi produk unggulan desa yang kedepan mampu berdampak besar,” tambahnya.

Upaya Suanda melalui Bumdes Usaha Sejahtera, sebetulnya agar para warga Desa Pesanggrahan yang mayoritas berprofesi petani dapat diberdayakan. Sebagai pengusaha lama yang menggeluti dunia pertanian, Suanda juga beberapa kali diminta menjadi narasumber beberapa kegiatan desa untuk membagi rahasia sukses kelola pertanian.

“Sebenarnya ikhtiar produk beras ini, kita berharap desa akan mendapatkan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes) tambahan. Makanya kita perlu bimbingan untuk pemasaran dari Pemkab Cirebon,” pungkas Suanda. •Par/Sar

## Jatianom

# Prioritas Benahi Jalan dan Bangun Ruko

Guna menunjang pemulihan ekonomi warga, Pemdes Jatianom tengah gencar memperbaiki jalan desa. Mereka juga berencana membangun ruko di atas titisara untuk disewakan.



Viki Novitadewi (Sekdes Jatianom)

**M**asyarakat Desa Jatianom, Susukan, Kabupaten Cirebon, mulanya mengeluhkan kondisi jalan desa yang rusak akibat sering terendam banjir. Hal itu sangat mengganggu mereka saat menjalankan aktivitas sehari-hari dan menghambat perputaran roda ekonomi.

Pemerintah Desa (Pemdes) Jatianom pun tak acuh. Tahun 2021, salah satu program unggulan mereka yakni pembenahan infrastruktur jalan di semua gang yang ada di desa.

“Saat ini kita sedang fokus pembenahan jalan, karena kalau hujan suka becek dan mengang-

gu kenyamanan warga. Meski sebelumnya sudah di-*paving* tapi cepat rusak. Makanya kita lakukan betonisasi agar tahan lama,” kata Viki Novitadewi, Sekretaris Desa Jatianom.

Walhasil, perbaikan menggunakan betonisasi menghabiskan hampir 50 persen dari alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Jatianom tahun 2021. Prosesnya pun telah berjalan sejak Agustus lalu, dan ditargetkan akan selesai di akhir 2021 untuk semua jalan gang setapak.

“Kalau sekarang baru di dua blok yang sudah diperbaiki. Desa kita kan ada lima blok dan semua jalannya pasti akan diper-

baiki untuk menunjang mobilitas warga. Ini juga merupakan salah satu langkah juga untuk bersiap pemulihan ekonomi kita,” jelas Novi.

Selain jalan, lanjut Novi, tak ketinggalan Pemdes juga memperbaiki drainase agar tak terjadi banjir. Dan tak kalah penting pengerasan jalan usaha tani di area persawahan untuk menunjang pertanian karena sebagian besar mata pencarian warga Jatianom merupakan para petani.

Sementara Pendapatan Asli Desa (PADes) Jatianom didapat dari penyewaan lahan titisara seluas 11 hektare. Sebagian para petani menyewa titisara milik Pemdes untuk ditanam padi, yang hasil panennya dilakukan lelang secara terbuka.

“Alhamdulillah dari kelola lahan titisara itu kita berhasil mendapatkan PADes kurang lebih Rp 74 juta per tahunnya,” ungkap Novi.

Untuk menambah pun-di-pundi PADes, kata Novi, saat ini Pemdes juga berencana membangun ruko di atas tanah titisara yang nantinya bisa disewakan ke para warga.

“Tahun depan kita berencana bangun ruko di atas lahan titisara, itu merupakan inisiasi dari pak kuwu langsung. Semoga saja bisa terealisasi agar PADes kita semakin meningkat,” tutupnya.

• Sar

## Karangwangi

# Dirikan Sanggar Hindari Anak Kecanduan Gawai

Pemdes Karangwangi bertekad mengurangi kecanduan gawai bagi anak-anak dengan mendirikan sanggar seni. Tiap Minggu pagi selalu ramai dikunjungi.



Sukardi (Kuwu Karangwangi)

Jika tiap hari Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, begitu bising akan suara mesin kayu mebel, maka berbeda pada Minggu pagi. Kebisingan itu digantikan dengan riuh tawa, obrolan dan gemuruh puluhan anak-anak yang akan dan tengah menunjukkan berbagai macam seni.

Mereka berkumpul di kantor desa, mempersiapkan diri untuk mulai berlatih seni tari. Sebagian didampingi orangtua mereka masing-masing. Menunggu giliran pentas di sanggar yang berdiri di halaman kantor desa.

Sanggar tari yang dibangun Pemerintah Desa (Pemdes) Karangwangi memang belum genap satu tahun setelah dibuka

sejak Januari 2021 lalu. Meski begitu antusias anak-anak begitu padat mengisi kegiatan di sanggar bernama Seni Prima Budaya.

“Sebenarnya pendirian sanggar itu untuk mengisi waktu luang anak-anak. Berawal dari banyaknya keluhan orang tua yang melihat anak mereka bermain *handphone* setiap hari, saya berinisiatif untuk membangun sanggar agar mereka bisa lebih aktif. Sekarang tak kurang dari 30 anak yang intens berlatih tiap Minggu,” ujar Sukardi, Kuwu Desa Karangwangi.

Tak hanya itu, Pemdes juga menyediakan pengajar tari dan fasilitas *sound system* untuk mendukung anak-anak berlatih. Selain seni tari, ada pula latihan

karate untuk anak-anak.

“Untuk kelompok karate pesertanya sekitar 50 anak. Kelompok tersebut dinamai Inkai Andeskar,” jelas Sukardi.

Upaya agar anak-anak tertarik bergabung ke sanggar seni dan Inkai, Pemdes Karangwangi juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di desa. Sosialisasi yang diberikan berupa kegiatan apa saja yang diadakan pemerintah desa.

“Sosialisasi kita mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemdes Karangwangi. Jadi kita dorong untuk anak-anak yang berminat bisa langsung datang ke sanggar desa,” tambah Sukardi.

Dalam beberapa kesempatan, peserta sanggar seni telah ikut memeriahkan kegiatan yang ada di desa. Seperti pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus lalu, anak-anak ikut menunjukkan kebolehan mereka dengan tampil menari.

Dengan adanya sanggar seni ini, Sukardi hanya berharap akan menumbuhkan pribadi yang disiplin bagi anak-anak dan dapat memunculkan daya kreativitas bagi mereka.

“Jadi tidak menghabiskan waktu dengan gawai saja, tapi melakukan hal yang lebih positif sekaligus bisa menjadi kebanggaan Desa Karangwangi. Kalau anak-anak kita pandai seni,” pungkasnya. •Soy

# Kudukeras Tangani Sampah Sejak dari Rumah

Program angkut sampah menjadi cara Pemdes Kudukeras serius menangani sampah sejak dari rumah. Seperti apa?



Suratno (Kuwu Kudukeras)

Sebelum tumpukan sampah di Desa Kudukeras, Kecamatan Babakan, sempat menjadi keluhan para warga pada 3 tahun lalu. Dari gundukan yang berada di saluran air dan mengakibatkan bau tak sedap, hingga sampah yang berserakan di pinggir jalan.

Akibatnya tak hanya warga yang terdampak, para pengguna jalan yang melintas pun juga merasakan pengaruhnya sehingga harus berhati-hati ketika melintas.

Oleh karena itu Suratno, Kuwu Desa Kudukeras tak ingin tinggal diam. Ia berupaya meminimalisir dengan mendirikan TPS dan membuat program angkut sampah.

“Untuk sementara ini, saya sudah membangun TPS dan membuat program angkut sampah yang dilakukan satu minggu dua kali,” jelas Suratno.

Langkahnya dimulai sejak dari rumah. Para warga diminta tidak perlu membuang sampah namun cukup mengumpulkannya di depan rumah. Setelah itu akan ada becak motor pengangkut sampah setiap 3 hari sekali.

“Alhamdulillah sejauh ini respon masyarakat juga cukup baik. Mereka hanya dibebankan untuk membayar iuran sebesar Rp 10 ribu dalam sebulannya untuk mengangkut sampah 2 kali dalam seminggu,” ujar Sekretaris Desa Kudukeras, Jaenudin.

Tak hanya itu, sebagai bukti

keseriusan penanganan sampah, Pemdes Kudukeras juga senantiasa mengingatkan terus menerus kesadaran warga dalam setiap digelarnya Musyawarah Desa (Musdes).

Mengingat pengalaman dampak sampah yang pernah terjadi di desanya, Suratno terus berupaya agar masalah sampah ini dapat terselesaikan. Ia berkeinginan akan mengoptimalkan program angkut sampah lebih optimal. Pasalnya, sejauh ini Pemdes baru memiliki fasilitas seadanya untuk pengangkutan sampah.

Suratno pun berencana, akan menambah fasilitas pengangkut yang lebih lengkap. Sekaligus mengolah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat untuk kedepannya.

“Kita sudah merancang untuk memaksimalkan program angkut sampah, seperti peralatan sampai pengolahan sehingga sampah tersebut bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Tidak hanya dibuang saja,” kata Suratno.

Hal ini dilakukan, lanjut Suratno, agar warga Kudukeras merasa nyaman dan mampu menciptakan desa yang sehat dan bersih.

“Itu alasan saya berusaha sekeras mungkin menanggulangi sampah yang dulu sempat menumpuk di beberapa titik,” pungkasnya. •Par



## Sedong Lor

# Tahun Depan Bangun Agrowisata

Upaya mendorong minat para pemuda bertani, Pemdes Sedong Lor siapkan lahan untuk bangun agrowisata.



Sufyan Suri (Kuwu Sedong Lor)

Tak perlu diragukan lagi, jika menilik Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong. Desa ini memiliki basis pertanian dan wisata alam yang besar. Sebut saja salah satunya keberadaan Setu Sedong dan kebun buah mangga gedong gincu.

Menyandang predikat desa maju, Sedong Lor mempunyai luas wilayah 337 hektare dengan jumlah penduduk 3891 jiwa. Luas tersebut dibagi jumlah tanah sawah sebesar 152,363 hektare, tanah pemukiman 142,800 hektare serta tanah setu 42 hektare. Tak heran, sebagian besar warga Desa Sedong Lor bekerja sebagai petani.

Supyan Suri, Kuwu Desa Sedong Lor mengatakan hingga kini ia tengah melakukan berbagai upaya menumbuhkan rasa produktifitas bidang pertanian.

“Memang mayoritas masyarakat terutama kalangan orangtua di sini bekerja sebagai petani, tetapi kalangan pemuda lebih tertarik bekerja di luar kota menjadi buruh pabrik. Dan itu menjadi kekhawatiran kami untuk regenerasi,” kata Sufyan.

Oleh karena itu, Pemdes berencana membangun agrowisata di sekitar Setu Sedong. Palsnya selain dapat mendorong minat para pemuda bertani, agrowisata diyakini akan mampu mening-

katkan Pendapatan Asli Desa (PADes) nantinya.

“Musrenbang lalu, saya mendengar langsung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciebon kalau rencana pendirian agrowisata sangat didukung dinas,” ungkap Sufyan.

Sejauh ini keberadaan agrowisata yang ada di Desa Sedong Lor masih dimiliki individu. Oleh karenanya, Pemdes berkeinginan desa memiliki sendiri agrowisata. Pemdes akan merealisasikannya pada 2022 nanti.

“Harusnya di tahun sekarang sudah digarap, karena keadaan sedang terdesak oleh pandemi maka perencanaan itu dimundurkan,” jelas Sufyan.

Sufyan begitu yakin, jika sektor perkebunan akan berhasil meningkatkan pemasukan tambahan bagi desa. Sejauh ini PADes Sedong Lor baru mencapai Rp 116 juta pada 2021. Itu pun dari sewa lahan titisara, pasar serta penyewaan lahan kebun mangga.

Selain potensi alam, Sufyan juga berencana mengembangkan wisata air yang akan dijadikan sebagai sarana rekreasi keluarga, seperti menyediakan sepeda air atau perahu mini, restoran dan areal pemancingan.

“Kalau sekarang memang sudah ada kalau pemancingan. Tapi belum dimanajemen oleh kita jadi belum ada pemasukan untuk desa,” pungkasnya. •Lan



## Mencari Ruang Keseriusan

Jika bertanya pada pemerintah daerah: sudah seriuskah membangun atau memajukan daerahnya? Jawabannya pasti serius, bahkan serius 3.000 kali. Apalagi jika bertanya kepada calon pemimpin daerah (yang kini sedang bersiap-siap), jawabannya bisa: serius 10.000 kali.

Tapi benarkah keseriusan itu berupa ucapan dengan penekanan angka kali lipat? Saya sih tidak begitu yakin. Untuk itu, mari kita cari ruang keseriusan itu ada dimana?

Hari ini, di penghujung 2021, kita menyadari bahwa Kabupaten Cirebon sudah tertinggal dibanding kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Data statistik menunjukkan bahwa angka pengangguran kita tertinggi se-Jawa Barat, mencapai 11,52 persen (pada 2020). Angka ini jauh di atas angka kemiskinan Jabar (10,46 persen), dan nasional (7,07 persen).

Prosentase kemiskinan di Kabupaten Cirebon masuk lima besar Jabar. Pada 2020 merosot tajam di angka 11,24 persen. Lagi-lagi jauh di atas rata-rata kemiskinan di Jabar (7,88 persen) dan nasional (9,78 persen).

Mari kita teropong lebih detil, pada ruang-ruang upaya menuntaskan pengangguran/kemiskinan itu. Dari sisi industri, sudahkah Cirebon membangun kawasan industri? Tak perlulah membandingkan dengan Bekasi atau Karawang. Lihatlah tetangga dekat, Brebes, kini sudah memiliki Kawasan Industri Brebes (KIB) dan terus mengembangkannya.

Salah satu yang dibangun Brebes adalah menyiapkan industri yang mendukung kebutuhan KIB, salah satunya garam industri. Tahun ini Brebes sedang membangun pabrik garam industri berkapasitas 50 ton per hari dengan anggaran Rp 80 miliar.

Padahal lahan tambak garam Brebes hanya 1.456 hektare, kalah dengan Cirebon yang memiliki 1.557 hektare. Namun, tampaknya Brebes lebih serius memberdayakan potensi daerahnya. Kemampuan para petambak Cirebon hanya 7,3 ton per hari.

Potensi lainnya soal hasil laut, PAD dari 7 tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Cirebon pada 2020 hanya Rp 27,9 juta. Kalah dengan satu TPI di

Kejawanan (Kota Cirebon) yang mencapai Rp 1,1 miliar. Lebih kalah lagi jika dibandingkan dengan TPI Karangsong (Indramayu) yang memberikan PAD hingga Rp 10,5 miliar.

Bagaimana dengan pariwisata? Potensi wisata di Kabupaten Cirebon juga luar biasa. Setiap hari ada 2.500 wisatawan yang mengunjungi Gunung Jati. Namun mereka tidak lebih dari 3 jam berada di Cirebon.

Tidak ada *staying power*, sesuatu yang membuat wisatawan berlama-lama di Cirebon. Apakah mereka tidak nyaman? Banyak sampah? Banyak pengemis? Kemanakah destinasi wisata lainnya? Sudahkah infrastruktur memadai?

Jika masih banyak tanda tanya, lantas dimanakah ruang keseriusan itu? Apakah keseriusan itu hanya cukup diucapkan saja? Ataukah memang ngumpet, kalah dengan ambisi memperkaya diri?

Sampai disini rasanya cukup untuk terus mencari ruang keseriusan. Sepertinya tidak akan membuahkan hasil. Tidak ada gunanya. Bahkan bisa berujung saling menyalahkan. Kenapa?

Karena keseriusan itu bukan untuk dicari di masa lalu. Keseriusan itu harus dibangun oleh kita hari ini, mulai saat ini. Kita takkan pernah menemukan keseriusan kalau bukan kita yang membangunnya.

Hakikat pembangunan berbasis kewilayahan adalah menuntut kita serius dan fokus pada sumber daya dan komoditi unggulan yang ada. Sebesar apapun potensi yang ada, jika tanpa keseriusan ia takkan berarti apa-apa.

Sebaliknya, meski potensi itu kecil, jika kita serius dan terus membangun keseriusan itu, maka hasil tak akan mengkhianatinya. Lihatlah Jepang, negara yang tak memiliki lahan layak pertanian, karena keseriusannya, sukses bertani dan melahirkan teknologi-teknologi baru pertanian.

Jadi, jika kita mencari ruang keseriusan, maka jawabannya ada pada diri sendiri. Ada pada setiap pribadi manusia Cirebon. Jika setiap pribadi serius, maka buka lagi ruang yang kita temukan, namun gedung bahkan istana keseriusan.



**SEKRETARIS DPRD  
DAN SELURUH PEGAWAI**



Mengucapkan Selamat

**Hari Raya Natal 2021  
& Tahun Baru 2022**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Mengucapkan Selamat

**Hari Raya Natal 2021  
& Tahun Baru 2022**